

ABSTRAK

MOH. HELMI, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengedukasi Masyarakat Untuk Pencegahan *Carok* Di Madura, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di bawah Bimbingan : Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat untuk pencegahan carok di Madura (studi kasus *carok* Madura). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field resech*) dengan pendekatan penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat untuk pencegahan *carok* di Madura yaitu memberikan edukasi dengan memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Madura yang dapat dilihat dari Perda Penyelenggaraan Pendidikan dari masing-masing daerah Kabupaten/Kota Madura. Adapun kebijakan pemerintah daerah Madura dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dan pelaku *carok* yaitu sesuai dengan hukum normatif, memberikan pengakuan HAM terhadap korban dan pelaku *carok* dengan meperlakukan sama didepan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta memberikan pengawasan, dan pembinaan kerukunan antar masyarakat, dalam bermasyarakat dan bernegara, sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) UU Permerintahan Daerah.

Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Mengedukasi Masyarakat, Madura.

ABSTRACT

MOH. HELMI, *Local Government Policy in Educating the community for carok Prevention in Madura*, thesis, Department of law, Faculty of Law, University of Trunojoyo Madura. Advisor: Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H.

The purpose of this study is to find out and understand how local government policies in educating the public for the prevention of carok in Madura (case study of carok Madura). This research is a field research with an empirical juridical research approach.

The results showed that the local government's policy in educating the community for the prevention of carok in Madura is to provide education by providing and improving the quality of education for the Madurese community which can be seen from the Perda on Education Implementation of each district/city of Madura. The Madura local government policy in providing legal protection for victims and perpetrators of carok is in accordance with normative law, giving recognition of human rights to victims and perpetrators of carok by treating them equally before the law in accordance with Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (1) of the Constitution. NRI of 1945, as well as providing supervision, and fostering harmony between communities, in society and the state, in accordance with Article 25 paragraph (1) letter (c) and letter (d) of the Regional Government Law.

Keywords: Policy, Local Government, Educating the Community, Madura.

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEDUKASI MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN CAROK DI MADURA	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penulisan	7
4. Kegunaan Penelitian.....	7
4.1. Kegunaan teoritis	7
4.2. Kegunaan Praktis	8
5. Orisinalitas Penelitian	8
6. Metode Penelitian.....	13
6.1. Jenis Penelitian	13
6.2. Pendekatan Penelitian.....	13
6.3. Sumber Data	14
6.4. <i>Sampling</i>	14
6.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	16
6.6. Analisis Data.....	19
7. Sistemetika Penulisan.....	19
BAB II BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT KEAMANAN DI DAERAH.....	21
2.1. Pengertian <i>carok</i>	21

2.2. Pengertian Peranan Pemerintah.....	23
2.3. Pengertian Kebijakan Pemerintah	31
2.4. Beberapa Teori :	41
2.4.1. Teori Organ Negara dan Lembaga Negara	42
2.4.2. Teori Kewenangan	49
2.4.3. Teori Perlindungan Hukum	53
BAB III KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN MASYARAKAT.....	57
3.1. Kebijakan Pemeritah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Di Madura.	59
3.1.1. Pemerintah Daerah Madura	59
3.1.2. Kebijakan Dan Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Madura .	72
3.1.2.1. Kebijakan Dan Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bangkalan	75
3.1.2.2. Kebijakan Dan Perlinungan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sampang	82
3.1.2.3. Kebijakan Dan Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pamekasan	90
3.2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban <i>Carok</i> Di Madura	102
3.2.1. Data kasus pembunuhan yang oleh pandangan umum masyarakat Madura di katakan sebagai <i>carok</i> di Kabupeten Sampang serta analisis dalam pelaksanaan perlindungan.	106
3.2.2. Data kasus pembunuhan yang oleh pandangan umum masyarakat Madura dikatakan sebagai <i>carok</i> di Kabupeten Pamekasan serta analisis dalam pelaksanaan perlindungan.	110
BAB IV PENUTUP	117
4.1. Kesimpulan.....	117
4.2. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	123